

**EVALUASI PROGRAM PNPM MANDIRI PEDESAAN DALAM
KEGIATAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN
(SPP) DI KENAGARIAN BATU KALANG KECAMATAN
PADANG SAGO KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Sebagai Salah
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh:

**NANA MARDENI
NIM. 55040**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Program PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kegiatan
Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kenagarian Batu
Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman

Nama : Nana Mardeni

TM/NIM : 2010/55040

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

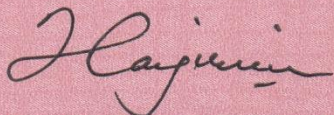
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 April 2014

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si

NIP. 19630617 198903 1 003

Pembimbing II



Dra. Hj. Heni Candra Gustina

NIP: 19630808 198703 2 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin, 21 April 2014 pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB
**Evaluasi Program PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kegiatan Kelompok
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kenagarian Batu Kalang Kecamatan
Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman**

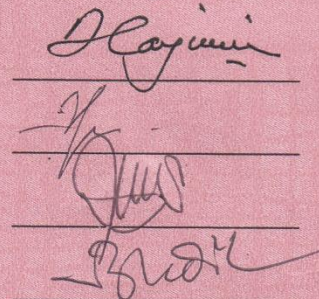
Nama : Nana Mardeni
TM/NIM : 2010/55040
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Padang, 21 April 2014

Tim Penguji:

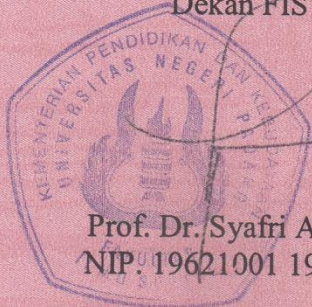
	Nama
Ketua	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
Sekretaris	: Dra. Hj.Heni Candra Gustina
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nana Mardeni

TM/NIM : 2010/55040

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Evaluasi Program PNPM Mandiri Pedesaan dalam Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kenagarian Batu Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 April 2014
Saya yang menyatakan,



Nana Mardeni
2010/55040

ABSTRAK

Nana Mardeni 2010/55040 :Evaluasi Program PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kenagarian Batu Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka kemiskinan di Kenagarian Batu Kalang karena rendahnya pendidikan khususnya perempuan sehingga berdampak pada pola pikir dan etos kerja mereka. Maka dibutuhkan program untuk memberdayakan perempuan di kenagarian ini. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan mengadakan kegiatan kelompok SPP untuk memberdayakan perempuan agar bisa membantu pendapatan rumah tangga tanpa harus bergantung pada suami sehingga mampu mengatasi kemiskinan. Untuk mengetahui jalannya program diperlukan evaluasi dari program tersebut dengan meninjau pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penetapan informan secara purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program kelompok SPP telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran dengan menggunakan indikator evaluasi. Hal ini terlihat dari sudah berdayanya perempuan yang memiliki ekonomi lemah, sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Program ini memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama perempuan dengan pemberian bantuan pinjaman modal yang diberikan. Dampak program tersebut telah dirasakan dengan banyaknya ibu rumah tangga telah mengembangkan usaha dan mampu mengelola keuangan rumah tangga mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan Kelompok SPP mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kenagarian Batu Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini dengan judul ” **Evaluasi Program PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kenagarian Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman.**”

Penulisan Skripsi ini selain bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang, disamping itu juga untuk mengetahui Evaluasi Program PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kenagarian Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik perorangan maupun badan-badan terkait yang telah memberikan bantuan dan bimbingan sampai selesainya Proposal ini.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.

3. Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, dan Dra. Hj. Heni Candra Gustina, selaku pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. DR. Syamsir, M.Si. Ph.D, dan Adil Mubarak, S.IP. M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh pihak di UPK PNPM-MPd Padang Sago dan seluruh pihak di Kenagarian Batu Kalang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melibatkan anggota dan masyarakat dalam pengambilan data penelitian.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materil didalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin...

Padang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	7
a. Identifikasi Masalah	7
b. Pembatasan Masalah	8
c. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	11
1. Konsep Evaluasi Program.....	11
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	17
3. PNPM Mandiri Pedesaan.....	21
4. Kegiatan SPP Sebagai Program Dari PNPM Mandiri.....	26
B. Kerangka Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Informan Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
a. Jenis Data.....	33
b. Sumber Data.....	34
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	34
1. Teknik Pengumpulan Data.....	34
2. Alat Pengumpulan Data	36
F. Uji Keabsahan Data.....	36

G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	41
a. Letak Geografis	41
b. Kependudukan	41
c. Potensi Nagari	42
d. Sarana dan Prasarana	42
B. Temuan Khusus.....	43
1. Pelaksanaan Kegiatan Kelompok SPP Oleh PNPM-Mpd Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kenagarian Batu Kalang.....	43
2. Dampak dari program Pnpm Mpd dalam kegiatan kelompok spp terhadap pemberdayaan perempuan untuk mengatasi kemiskinan di kengarian batu kalang	56
C. Pembahasan	62
1. Pelaksanaan Kegiatan Kelompok SPP Oleh PNPM-Mpd Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kenagarian Batu Kalang.....	62
2. Dampak dari program Pnpm Mpd dalam kegiatan kelompok spp terhadap pemberdayaan perempuan untuk mengatasi kemiskinan di kengarian batu kalang	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Kenagarian Batu Kalang	4
2. Tingkat Pendidikan dan Mata Pencarian Penduduk	4
3. Daftar Nama-Nama Informan.....	33
4. Perbandingan Kesejahteraan KK	39
5. Daftar Sarana dan Prasarana di Batu Kalang.....	43
6. Perbandingan Kesejahteraan KK	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Wawancara Dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan.....	89
2. Wawancara Dengan Wali Nagari Batu Kalang	89
3. Foto Bersama Dengan Kelompok SPP UP2K Setelah Wawancara.....	90
4. Foto Bersama Dengan Kelompok SPP Lumbung Setelah Wawancara ...	90
5. Foto Dengan Ketua Kelompok SPP Lumbung Mas Setelah Wawancara	91
6. Foto Dengan Anggota Kelompok SPP KKS Setelah Wawancara.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	80
2. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas	85
3. Surat Izin Penelitian Dari Kesbangpol.....	86
4. Surat Pernyataan Selesai Penelitian Dari Wali Nagari	87
5. Surat Pernyataan Selesai Penelitian Dari UPK	88
6. Dokumentasi Penelitian	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan terbesar yang sedang di hadapi oleh Indonesia adalah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013 indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,75 % menjadi 1,89 %. Kemudian indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43 % menjadi 0,48 %. Artinya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia semakin parah sebab berada menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar. Apabila dibandingkan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Tercatat secara kedalaman perkotaan sebesar 1,41 % dan pedesaan jauh lebih tinggi yaitu 2,37%. Sementara nilai indeks keparahan kemiskinan perkotaan hanya 0,37 % sementara dipedesaan sebesar 0,60%.

Menurut Mursito (1991), ada beberapa faktor dasar yang kompleks yang menstruktur dalam proses kemiskinan dipedesaan yaitu :

1. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang rendah sehingga penduduk hanya sanggup dan siap untuk bekerja pada sector pertanian.
2. Distribusi dan struktur kependudukan dipedesaan tidak seimbang menurut pembagian umur penduduk yang terdiri dari

pemuda dan anak-anak sehingga menuntut banyak waktu dan biaya serta tenaga dari keluarga.

Kemiskinan ini dapat di lihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Seperti yang diungkapkan oleh Prijono (1996:78) bahwa Pemberdayaan masyarakat menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Disamping itu pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau member motivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Untuk itu perlu adanya suatu program yang mewujudkan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih berdaya sehingga mereka dapat keluar dari masalah kemiskinan karena jika program yang di adakan pemerintah benar-benar di jalankan sesuai dengan ketentuan dan tujuannya maka kemiskinan akan dapat di tanggulangi. Penanganan kemiskinan dapat di lakukan dengan meningkatkan keterampilan sumberdaya manusia, penambahan modal investasi dan pengembangan

teknologi. Melalui berbagai suntikan maka di harapkan produktifitas akan meningkat, masyarakat di harapkan melakukan partisipasi aktif. Karena melalui partisipasi aktif masyarakat tidak akan hanya menjadi objek program, tetapi ikut serta menentukan proogram yang paling cocok bagi mereka. Masyarakat dapat memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah khusus dan daerah tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang di nilai selama ini berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efesiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partsipasi masyarakat.

Pada observasi awal di kenagarian Batu Kalang, Padang Pariaman, tingkat kemiskinan masyarakat tergolong tinggi. Dari data yang penulis peroleh dari Kantor Wali Nagari Batu Kalang, diketahui bahwa jumlah penduduk di Kenagarian ini adalah 3.497 jiwa yang terdiri dari 760 kepala keluarga (KK).

Tabel. 1 Jumlah Penduduk Kenagarian Batu Kalang

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah penduduk	3.497
	- Laki-laki	1.632
	- Perempuan	1.865
2.	Jumlah kepala keluarga (KK)	760
	- KK miskin	235
	- KK prasejahtera	162
	- KK sedang	152
	- KK sejahtera	144
	- KK kaya	67

Sumber : Kantor Wali Nagari Batu Kalang, RPJM Tahun 2011-2015

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk di Kenagarian ini adalah 3.497 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 1.632 jiwa dan perempuan 1.865 jiwa. Kenagarian ini terdiri dari 760 Kepala Keluarga (KK). Jumlah KK miskin mendominasi yaitu 30,9 % dari total KK, KK pra sejahtera 21,3 %, KK sejahtera 18,9 %, KK sedang 20,0 % dan kaya 8,8 %.

Tingginya angka kemiskinan di Kenagarian ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor rendahnya pendidikan yang berdampak terhadap mata pencarian penduduk.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan dan Mata Pencarian Penduduk

No	Uraian	Jumlah
1.	Tingkat Pendidikan	
	- Tidak tamat SD	431
	- SD	807
	- SLTP	916
	- SLTA	1.150
	- Diploma/ Sarjana	193

2.	Mata Pencarian	
	- Buruh tani	770
	- Petani	583
	- Peternak	239
	- Pedagang	273
	- Tukang kayu	288
	- Tukang batu	255
	- Penjahit	239
	- PNS	115
	- Pensiunan	62
	- TNI/ Polri	21
	- Perangkat nagari	14
	- Pengrajin	191
	- Industry kecil	137
	- Buruh industry	125
	- Lain-lain	185

Sumber : Kantor Wali Nagari Batu Kalang, RPJM Tahun 2011-2015

Dari data yang penulis peroleh dari Kantor Wali Nagari, pendidikan dari tamatan SLTA baru terjadi beberapa tahun terakhir sehingga tamatan SLTP kebawah menjadi dominan. Karena rendahnya pendidikan ini banyak masyarakat kurang berdaya dan tidak punya kemampuan untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan yang lebih mapan terutama perempuan. Perempuan di Kenagarian ini rata-rata merupakan tamatan SLTP kebawah. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan ini berdampak pada pola pikir dan etos kerja mereka yang rendah karena perempuan di kenagarian ini tidak punya keahlian dan keterampilan khusus untuk membantu atau menambah pendapatan rumah tangganya. Faktor lain dari kurang berdayanya perempuan di Kenagarian ini adalah kurangnya ketersediaan dana untuk mengembangkan modal usaha. Dengan kondisi ketidak berdayaan tersebut, mengakibatkan

perempuan di kenagarian ini hanya menggantungkan hidup mereka pada suaminya.

Karena kurang berdayanya masyarakat tersebut, Kenagarian Batu Kalang adalah salah satu nagari yang mendapatkan program penanggulangan kemiskinan dari PNPM Mandiri Pedesaan. Pemberdayaan ini berupa pemberian bantuan modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sumber air bersih, polides, dan lainnya. Selain untuk pembangunan infrastruktur, PNPM Mandiri Perdesaan juga memberikan bantuan berupa modal usaha bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka.

Oleh karena itu PNPM Mandiri Perdesaan menetapkan satu jenis kegiatan yaitu penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) yang akan di biayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dalam PTO PNPM-MP : 2008 dijelaskan bahwa setiap Nagari dapat mengajukan usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang di tetapkan oleh musyawarah nagari khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25 % dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per nagari namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok perempuan yang telah di bentuk. Pemberdayaan perempuan yang di lakukan di nagari Batu Kalang ini adalah berupa bantuan modal untuk perempuan yang akan membuka usaha kecil seperti usaha dagang dan jahit.

Dengan adanya bantuan yang diberikan, diharapkan berdampak positif dan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar perempuan mampu menjadi perempuan yang mandiri yang dapat menghasilkan uang dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat menambah pendapatan dalam rumah tangga. Untuk mengetahui apakah program ini berhasil atau tidak maka dibutuhkan sebuah evaluasi.

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Evaluasi Program PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kenagarian Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman”**.

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di Kenagarian Batu Kalang.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemberdayaan perempuan di Kenagarian Batu Kalang.
3. Dengan kondisi ketidak berdayaan, banyak perempuan di Kenagarian Batu Kalang yang hanya menggantungkan hidup mereka pada suaminya.

4. Keterbatasan dana untuk modal usaha pada umumnya perempuan di Nagari Batu Kalang tidak mampu meningkatkan pendapatan Rumah Tangga mereka.

b. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, dan supaya pembahasannya mencapai sasaran yang diinginkan, maka masalah dibatasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai program PNPM-Mp dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan di Kenagarian Batu Kalang.
2. Dampak dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mp) dalam kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap pemberdayaan perempuan untuk mengatasi kemiskinan di Kenagarian Batu Kalang.

c. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai program PNPM-Mp untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan di Kenagarian Batu Kalang?

2. Bagaimana dampak dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-Mp) dalam kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap pemberdayaaan perempuan untuk mengatasi kemiskinan di Kenagarian Batu Kalang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM-Mp untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan di Kenagarian Batu Kalang.
2. Untuk mengetahui dampak dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-Mp) dalam kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap pemberdayaaan perempuan untuk mengatasi kemiskinan di Kenagarian Batu Kalang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan dan dapat di gunakan untuk memperkuat kebenaran teori tentang Pemberdayaan

Masyarakat Miskin melalui Program PNPM Mandiri Perdesaan dalam kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kenagarian Batu Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk ikut membantu terlaksananya evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program PNPM Mandiri Perdesaan dalam kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kenagarian Batu Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Bagi masyarakat Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago untuk dapat berpartisipasi melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam mengatasi kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasi atau mengimplementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan.

Evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Evaluasi program merupakan alat bantu bagi pimpinan suatu organisasi dalam membuat suatu keputusan dan sebagai suatu alat manajemen. Menurut Cronbach dan Stufflebeam (1963, dalam Arikunto 2010:5) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Arikunto (2010:25) menjelaskan hal-hal yang harus dipelajari oleh seorang evaluator meliputi tujuan program, komponen program, siapa pelaksananya, dan pihak-pihak mana yang terlibat, kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan, dan gambaran singkat tentang sejauh mana tujuan program sudah dicapai. Sedangkan Tayibnapis (2008:4) mengatakan evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program,

pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat.

Arikunto (2010:18) menjelaskan bahwa tujuan dari diadakan evaluasi program untuk mengetahui pencapaian program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Sementara menurut Harry (dalam Yusran:2006:135) hikmat evaluasi memiliki tujuan sebagai berikut; 1) Untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan program, keluaran, manfaat dan dampak dari program yang sudah dilaksanakan; 2) Sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian program selanjutnya; 3) Dari tujuan tersebut dapat dilihat bahwa indikator evaluasi ada tiga; Pertama, Efisiensi yaitu masukan kedalam kerjaan sesuai keluarannya (output); Kedua, Efektivitas yaitu ukuran sejauh mana suatu program pengembangan mencapai tujuan khusus yang ditetapkan; Ketiga, Dampak (impact) yaitu apakah yang kita lakukan menghasilkan perbedaan terhadap masalah yang coba kita kerjakan.

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program. Untuk mengetahui seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan yang sudah tercapai, dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya, perlu adanya evaluasi program. Tanpa ada evaluasi, keberhasilan dan kegagalan program tidak dapat

diketahui. Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya.

Menurut Fernandes (1984, dalam Arikunto 2010:5), pemikiran secara serius tentang evaluasi program dimulai sekitar tahun delapan puluhan. Sejak tahun 1979-an telah terjadi perkembangan sehubungan dengan konsep-konsep yang berkenaan dengan evaluasi program, sebagai contoh teori yang dikemukakan oleh Cronbach (1982) tentang pentingnya sebuah rancangan dalam kegiatan evaluasi program.

Dalam evaluasi program, pelaksana (evaluator) ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Dalam evaluasi program, pelaksana (evaluator) ingin mengetahui tingkat ketercapaian program, dan apabila tujuan belum tercapai pelaksana (evaluator) ingin mengetahui letak kekurangan dan sebabnya. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindak lanjut atau keputusan yang akan diambil. Dalam kegiatan evaluasi program, indikator merupakan petunjuk untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kegiatan.

Arikunto (2010:22) menjelaskan bahwa ada kemungkinan empat kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan yaitu: (1) menghentikan program karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada

manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, (2) merevisi program karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan, (3) melanjutkan program karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat, (4) menyebarluaskan program karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi ditempat dan waktu yang lain.

Tayibnapis (2008:9) menyatakan suatu program mungkin saja sesuatu yang berbentuk nyata (tangible). Bila mengevaluasi suatu program, kita harus secara teratur menyimpulkan informasi bagaimana program itu berjalan, tentang dampak yang mungkin saja terjadi, atau untuk menjaawab pertanyaan yang diamati. Kadang-kadang informasi yang dikumpulkan berguna untuk membuat keputusan tentang program. Terlepas dari bagaimana penggunaannya suatu evaluasi program harus mengumpulkan informasi yang valid, informasi yang dapat dipercaya, informasi yang berguna untuk program yang dievaluasi.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno 2002:166), evaluasi program dapat dibedakan dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu program dengan menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu program berdasarkan standar atau kriteria yang

telah ditetapkan sebelumnya. Lee J. Cronbach (1980, dalam Tayibnapis 2008:8) mengatakan bahwa standar yang digunakan untuk melakukan evaluasi mungkin tidak sepenting konsekuensinya. Ia mengatakan evaluasi yang baik ialah yang memberikan dampak yang positif pada perkembangan program.

Sedangkan interprestasinya secara umum (dalam Yusran, 2006:133), evaluasi bagi organisasi adalah istilah umum yang digunakan bersama-sama dengan kaji ulang. Organisasi lain menggunakannya dalam pengertian yang lebih ketat sebagai penilaian yang lebih komprehensif terhadap keluaran dan dampak program, apa sumbangannya terhadap pencapaian tujuan sasaran. Evaluasi biasanya dilakukan oleh baik orang dalam maupun orang luar untuk membantu pihak terkait dan pembuat keputusan menerapkan pelajaran yang sudah dipetik. Evaluasi berfokus khusus pada dampak dan sustainabilitas. Evaluasi dapat dilakukan dengan empat cara; 1) Perencanaan (ex-ante evaluation); 2) program/kegiatan sedang berjalan (on-going evaluation); 3) program/kegiatan selesai dibangun (terminal evaluation); 4) program/kegiatan sudah berfungsi (ex-post evaluation).

Dalam penelitian ini model evaluasi yang digunakan adalah Goal Oriented Evaluation Model atau yang berorientasi pada tujuan. Yang menjadi obyek pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus, men-cek sejauh mana

tujuan tersebut sudah terlaksana dalam proses pelaksanaan program. Secara umum model evaluasi ini memberikan penekanan terhadap produktivitas dan akuntability dalam suatu aktifitas. Model ini juga sering dipergunakan untuk mengukur pencapaian dan kemajuan suatu program. Model ini menepikan dimensi proses dalam pelaksanaan evaluasi. Model ini sering mengutarakan pertanyaan seperti apakah program dapat mencapai suatu sasaran dengan baik. Untuk membentuk pencapaian, Tyler (dalam Arikunto:2010) menggariskan beberapa prosedur yang perlu diikuti, yaitu: (a) Mengenal pasti sasaran program yang hendak dijalankan, (b) Menguraikan setiap tujuan dalam bentuk tingkah laku dan isi kandungan, (c) Mengenal pasti situasi dimana tujuan yang hendak digunakan, (d) Menentukan arah untuk mewakili situasi, dan (e) Menentukan arah untuk mendapatkan hasil.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan masyarakat berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kemampuan/kekuatan dari yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Soeharto (2005:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kekuatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok

lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Mubyarto (dalam Suryono 2006:147) mengatakan bahwa pemberdayaan lebih berupa tindakan-tindakan yang konkrit yang dapat meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan kelembagaan. Selain itu, praktek pemberdayaan adalah merupakan upaya membuka pengertian kesadaran yang lebih luas tentang hak dan kewajiban politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sedangkan Kartasasmita (dalam Suryono 2006:147) mengatakan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Prijono (1996:263) menyatakan, konsep sederhana tentang pemberdayaan masyarakat yaitu suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Siagian (2003:24), pemberdayaan masyarakat bukan saja membutuhkan SDM (masyarakat atau fasilitator), modal dan sarana, tapi juga

membutuhkan nilai-nilai yang jelas, yang akan memandu serta mengorientasikan kearah mana perubahan akan di lakukan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan berfungsi bukan menjadi objek tetapi menjadi subyek. Merekalah yang secara bersama-sama akan menentukan kearah mana mereka akan berkembang.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (dalam Huraerah, 2006) menyatakan uapaya memberdayakan masyarakat setidaknya-tidaknya harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu (1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan titik tolak bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. (2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, (3) memberdayakan pula mengandung arti melindungi. Soegijoko (1997:179) menyatakan terdapat tiga pendekatan dalam memberdayakan masyarakat miskin. *Pertama*; pendekatan yang terarah artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin. *Kedua*; pendekatan kelompok artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. *Ketiga*; pendekatan pendampingan artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu di dampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian.

Tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyan (2004:83) adalah tahapan penyadaran terhadap masyarakat sehingga merangsang kesadaran mereka tentang perlunya perbaikan kondisi, serta pemberian pengetahuan penyuluhan atau pelatihan serta pemberian dana kepada keluarga yang tergolong prasejahtera.

Dalam melakukan harus ada dua hal penting yang digabungkan yaitu kekuasaan dan kekuatan. Apabila hanya kekuatan yang menjadi dasar untuk melakukan pemberdayaan tidak akan pernah terjadi, pada dasarnya penggabungan itu ingin agar semua dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar terjadi eksistensi manusia memang perlu melakukan itu untuk mencapai pemberdayaan dirinya sendiri. Pemberdayaan merupakan sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dalam menciptakan manusia yang adil dan beradab akan terwujud didalam berbagai kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Apabila kekuasaan diibaratkan bangunan dasar maka pemberdayaan merupakan bangunan diatasnya. Berbicara mengenai pemberdayaan tanpa dilandasi oleh sikap dan konsep secara mendasar mengenai kekuasaan berarti membangun bangunan atas tanpa dilandasi bangunan bawah yang menopangnya.

Dimensi pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan terutama dalam pengembangan kegiatan sosial ekonominya. Dimensi

kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Sedang dimensi perekonomian rakyat dapat ditandai oleh tersedianya dana untuk modal usaha guna dikembangkan oleh masyarakat miskin itu sendiri. Berdasarkan hal itu dapat dikemukakan bahwa dalam konteks penanggulangan kemiskinan mereka tidak hanya didekati sebagai objek, tetapi harus dipandang sebagai subyek atau pelaku yang dikelompokkan dalam golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mereka adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumberdaya, mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok masyarakat lemah termasuk individu-individu yang memiliki masalah kemiskinan. Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta berupaya membangkitkannya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat akan menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan

menjamin keberlanjutan berbagai hasil pembangunan yang akan di capai.

3. PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program PNPM Mandiri disini adalah program PNPM Mandiri Perdesaan. Lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan, dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan atas empat jenis kegiatan yang meliputi : (1) kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat memberi manfaat jangka pendek maupun manfaat jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, (2) peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat, (3) kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan

kelompok usaha ekonomi terutama bagi usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal, (4) penambahan permodalan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Dalam PTO PNPM-MP (Penjelasan IV:2007:1) disebutkan bahwa penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antar desa dengan menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan masyarakat, didukung sumberdaya yang ada dan upaya pelestarian kegiatan.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan (dalam PTO PNPM-Mp:2008:1) adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumberdaya diluar lingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah : (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, (3) pengaktifan fungsi dan peran pemerintahan lokal, (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kerjasama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pendekatan sebagai pemberdayaan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Keluaran program PNPM Mandiri Perdesaan adalah (PTO PNPM-MP:2008:2) :

- a. Terjadinya peningkatan keterlibatan rumah tangga miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian
- b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif didesa dan antar desa
- c. Terjadinya peningkatan kapaasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif
- d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat

- e. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan ekonomi terhadap RTM.
- f. Terbentuknya dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan
- g. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Sesuai dengan pedoman umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi :

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata
- b. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar

- c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin. pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin
- e. Partisipasi. Adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, fikran, atau dalam bentuk materil
- f. Kesenjangan dan keadilan gender. Adalah masyarakat laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik
- g. Demokratis. Adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan dengan cara musyawarah dan mufakat
- h. Transparansi dan akuntabel. Adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan segala proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan

secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif

- i. Prioritas. Masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan
- j. Keberlanjutan. Adalah bahwa setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

4. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan sebagai program dari PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam Penjelasan IV PTO PNPM-MP : 57 di jelaskan bahwa Kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kegiatan kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan khususnya adalah : (1) mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, (2) memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan

modal usaha, (3) mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Ketentuan dasar dari kelompok SPP adalah : (1) *Kemudahan* artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan, (2) *Terlembagakan* artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman, (3) *Keberdayaan* artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan pertimbangan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan, (4) *Pengembangan* artinya sikap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan, (5) *Akuntabilitas* artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM.

Sasaran program dari kelompok SPP adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah ada dimasyarakat. Bentuk dari kegiatan

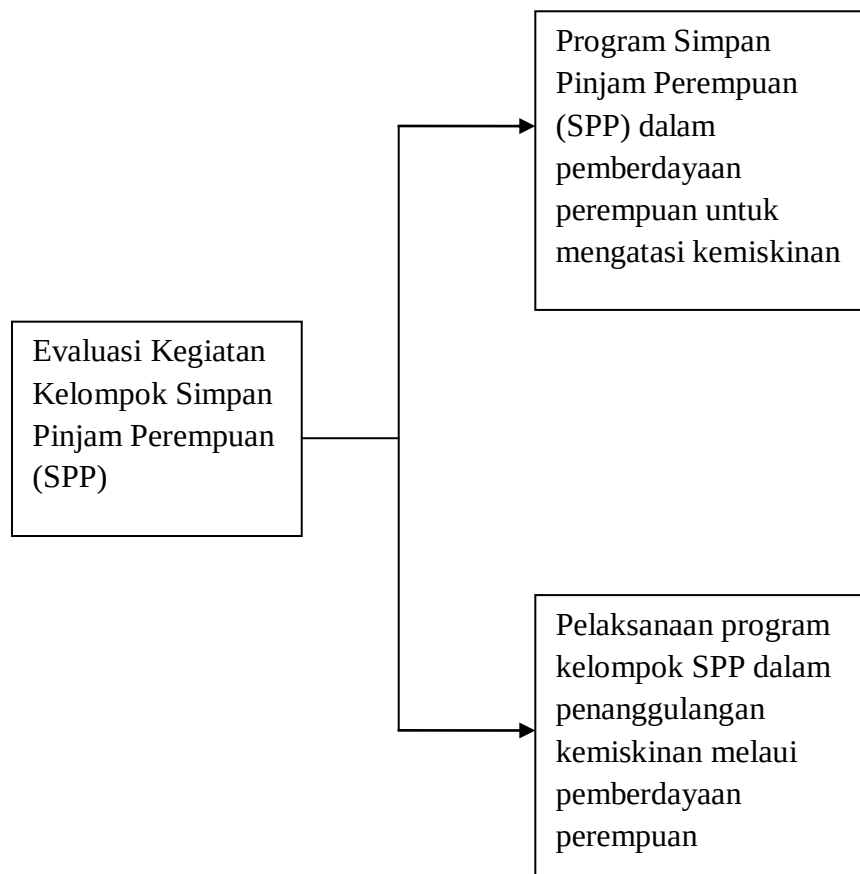
SPP memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Ketentuan kelompok SPP adalah : (1) kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama saling mengenal memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun, (2) mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati, (3) telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota, (4) kegiatan pinjaman kepada kelompok masih berlangsung dengan baik, (5) mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

B. Kerangka Konseptual

PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam dimana kegiatan ini merupakan salah satu program dari PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui kelompok SPP ini, PNPM Mandiri Perdesaan berperan dalam memberdayakan perempuan untuk mengatasi kemiskinan. Oleh sebab itu dibutuhkan evaluasi perananan dan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan agar kita dapat mengetahui apakah kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik atau tidak.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut :



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB IV tentang Evaluasi Program PNPM-MPd dalam Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kenagarian Batu Kalang Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program PNPM-MPd dalam kegiatan kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di Kenagarian Batu Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan dasar dari kegiatan ini. Sasaran utama dari program ini adalah perempuan-perempuan dari kalangan menengah kebawah yang memiliki usaha dan membutuhkan modal. Program SPP ini memberikan bantuan permodalan kepada perempuan-perempuan tersebut agar dapat meningkatkan usahanya. Dengan modal yang diberikan diharapkan dapat memberdayakan perempuan tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga. PNPM-MPd ini sudah dijalankan sejak tahun 2008 di Kenagarian ini. pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan dasar dari Kegiatan Kelompok SPP yaitu memberikan kemudahan bagi para anggota terbukti dengan tidak adanya agunan untuk peminjaman. Anggota yang ingin meminjam

cukup hanya dengan memberikan foto copi KTP kepada ketua kelompok. Lalu ketua kelompok membuat proposal pengajuan pinjaman kepada UPK serta melampirkan KTP dari para calon peminjam. Kemudian UPK memferivikasi data dengan berbagai pertimbangan. Setelah itu baru dana dicairkan dan diberikan kepada ketua kelompok masing-masing. Ketua kelompoklah kemudian yang menyalurkan dana tersebut kepada masing-masing anggota. Namun demikian masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih adanya pemalsuan data untuk pencairan dana tersebut sehingga ada anggota yang sebenarnya tidak meminjam namun namanya tertera pada daftar peminjam.

2. Dampak dari pelaksanaan program PNPM-MPd dalam kegiatan kelompok SPP di Kenagarian Batu Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman adalah positif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perempuan di Kenagarian ini telah mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga tanpa harus mengandalkan dan menggantungkan hidup terhadap suami. Program ini dikatakan mampu memberdayakan perempuan di Kenagarian ini sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Kenagarian Batu Kalang. Selain itu dampak positif dari program ini adalah meningkatnya kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan rumah tangga. Adapun dampak negatif dari program ini yaitu dipublikasikannya nama para anggota yang menunggak pada

papan pengumuman yang ada di Kantor UPK . Namun dampak negative ini tidak terlalu mempengaruhi jalannya program.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang evaluasi program PNPM-MPd dalam kelompok SPP di Kenagarian Batu Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Seharusnya Tim Pengelola Kegiatan lebih teliti dalam verifikasi data calon peminjam. Sehingga tidak ada lagi pemalsuan data yang dilakukan oleh kelompok untuk pencairan dana.
2. Kepada pengurus UPK akan lebih baik jika nama dari anggota yang menunggak angsuran tidak dipublikasikan karena ini dapat berpengaruh terhadap psikologis si peminjam.
3. Untuk masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam menjalankan program kegiatan karena partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi suksesnya suatu program yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2006. Strategi Penanggulangan Kemiskinan (*Pikiran Rakyat*)
Artikel. UNPAS. Bandung
- Agus Suryono. 2006. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang : Universitas
Negeri Malang Press.
- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*.
Yogyakarta: Gava Medika.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media
Pressindo.
- Edi Soeharto. 2005. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung:
Reffika Aditama.
- Farida Yunus Tayibnapis. 2008. *Evaluasi Program dan instrumen evaluasi*.
Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartini Kartono. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar
Maju.
- Lexy J Moleong. 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Modul Peningkatan Kapasitas Pengurus Kelompok Simpan Pinjam Perempuan
(SPP). 2013. Kecamatan Padang Sago.
- Ndaru Mursito. 1991. *Suatu Tinjauan Atas Kemiskinan Struktural di Pedesaan*.
Jakarta: CSIS.
- Onny S Prijono dan A M W Pranakka. 1996. *Pemberdayaan: konsep, kebijakan
dan implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Petunjuk Teknis Operasional. 2007. Program PNPM Mandiri Perdesaan.
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Petunjuk Teknis Operasional. 2008. Program PNPM Mandiri Perdesaan.
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Rahmadani Yusran, dkk. 2006. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Padang: Universitas
Negeri Padang.
- Soegijoko dkk. 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*.
Jakarta: PT. Gramedia.
- Sondang P Siagian. 2003. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi Dan
Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.